

**IMPLEMENTASI *TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT* DALAM
MENANGANI PERMASALAHAN DI LAUT SULU-SULAWESI DAN
PERAIRAN LEPAS PANTAI SABAH BAGIAN TIMUR, 2016-2025**

(Skripsi)

Oleh
RISMA OKTAVIA
NPM 2216071046



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT* DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DI LAUT SULU-SULAWESI DAN PERAIRAN LEPAS PANTAI SABAH BAGIAN TIMUR, 2016-2025

Oleh

RISMA OKTAVIA

Kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas pantai Sabah bagian timur menghadapi ancaman kejahatan maritim transnasional. Ancaman tersebut mencakup perompakan bersenjata, penculikan awak kapal, dan aksi kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Insiden tersebut mencapai puncak tertinggi pada tahun 2016 dengan delapan belas kasus yang tercatat. Oleh karenanya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyusun kerangka *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada Mei 2016. Kerja sama ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan maritim di *Tri Border Area*. Penelitian ini menganalisis implementasi TCA selama periode 2016-2025 secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja sama multilateral dan teori diplomasi pertahanan. Konsep multilateral menekankan koordinasi antartiga negara secara terbatas. Teori diplomasi pertahanan menjelaskan penggunaan instrumen militer secara damai. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan ReCAAP, publikasi jurnal ilmiah serta berbagai sumber berita media internasional dan lembaga terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TCA berhasil menurunkan insiden kejahatan, dimana tidak ditemukan kasus pada periode 2021-2025. Keberhasilan ini dicapai melalui pilar operasional seperti *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP), dan penguatan *Maritime Command Center* (MCC). Berdasarkan konsep multilateral, TCA merupakan institusi terbatas (*restricted institution*) yang mengikat ketiga negara secara tak terpisahkan (*indivisibly linked*) untuk saling bergantung. Adapun dari teori diplomasi pertahanan, TCA berfungsi sebagai instrumen transformasional yang berhasil menyelesaikan krisis keamanan dan memulihkan keseimbangan regional. Secara keseluruhan, TCA membuktikan bahwa kolaborasi trilateral yang terinstitusi efektif menjaga kedaulatan dan stabilitas maritim regional.

Kata Kunci: Indomalphi, *Trilateral Cooperative Arrangement*, *Tri Border Area*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT FOR ADDRESSING ISSUES IN THE SULU- CELEBES SEAS AND THE WATERS OFF EASTERN SABAH, 2016-2025

By

RISMA OKTAVIA

The Sulu-Sulawesi Sea region and the waters off eastern Sabah face the threat of transnational maritime crime. These threats include armed piracy, the kidnapping of ship crews, and attacks by the Abu Sayyaf armed group. Such incidents peaked in 2016, with eighteen cases recorded. Consequently, Indonesia, Malaysia, and the Philippines established the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) framework in May 2016. This cooperation aims to maintain maritime security stability in the Tri-Border Area. This study provides an in depth analysis of the implementation of the TCA during the 2016–2025 period. This research applies multilateral cooperation frameworks and defense diplomacy theory. Multilateral concepts emphasize limited coordination among the three countries. Defense diplomacy theory explains the peaceful use of military instruments. The research method used is qualitative with a case study approach. Secondary data is sourced from official documents, ReCAAP reports, scientific journal publications, as well as various international media news sources and relevant institutions. The research findings show that the TCA has successfully reduced crime incidents, with no cases reported during the 2021–2025 period. This success was achieved through operational pillars such as the Trilateral Maritime Patrol (TMP), Trilateral Air Patrol (TAP), and the strengthening of the Maritime Command Center (MCC). Based on the concept of multilateralism, the TCA is a restricted institution that binds the three countries indivisibly, fostering mutual dependence. From the perspective of defense diplomacy theory, the TCA functions as a transformational instrument that successfully resolves security crises and restores regional balance. Overall, the TCA demonstrates that institutionalized trilateral collaboration effectively safeguards regional maritime sovereignty and stability.

Keywords: Indomalphi, Trilateral Cooperative Arrangement, Tri Border Area

**IMPLEMENTASI *TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT* DALAM
MENANGANI PERMASALAHAN DI LAUT SULU-SULAWESI DAN
PERAIRAN LEPAS PANTAI SABAH BAGIAN TIMUR, 2016-2025**

**Oleh
RISMA OKTAVIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT* DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DI LAUT SULU-SULAWESI DAN PERAIRAN LEPAS PANTAI SABAH BAGIAN TIMUR, 2016-2025

Nama Mahasiswa : **Risma Oktavia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071046

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP/197912302014041001

Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.
NIP. 197809022002122007

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

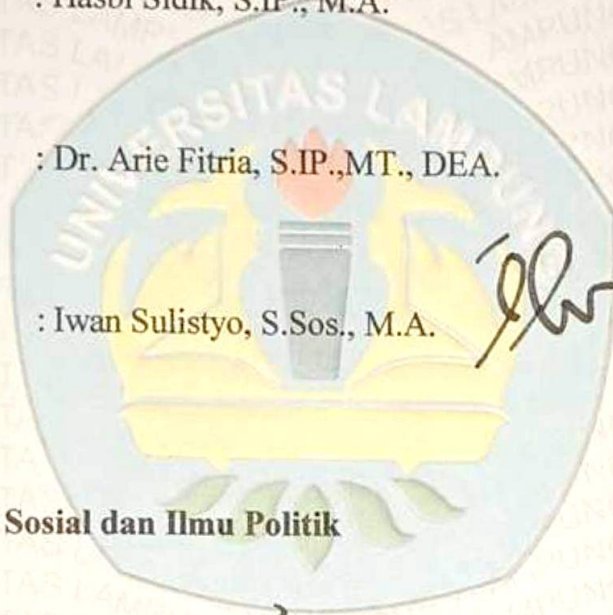
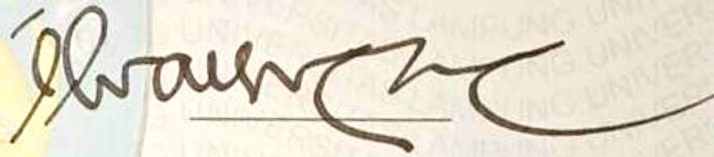
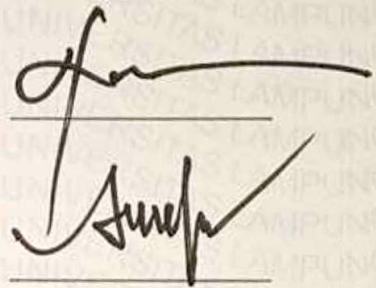
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

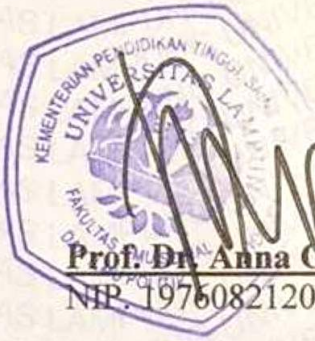
Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Dr. Arie Fitria, S.IP.,MT., DEA.

Penguji Utama : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 17 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Risma Oktavia
NPM. 2216071046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Risma Oktavia, dilahirkan di Pringsewu pada 13 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jaja Darwija dan Ibu Sumarni. Penulis memulai pendidikan formal di TK Dharma Wanita Pemersatuan, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gumukmas. Selanjutnya, Penulis menempuh pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Pagelaran, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Pagelaran.

Pada tahun 2022, Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi sebagai mahasiswa S-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, dengan mengambil Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, Penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan diri, dengan bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hubungan Internasional Universitas Lampung, sebagai sekretaris umum pada periode 2024/2025. Selain itu, Penulis juga mengikuti kegiatan organisasi di dalam kampus, seperti UKM-U PIK-R RAYA dan UKM-F SPEC. Penulis aktif pada kegiatan sukarela (*volunteer*) dan kepanitiaan yang lebih sering tergabung dalam divisi humas. Pada tahun 2025, penulis mendapat kesempatan untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Berbagai kegiatan akademik dan nonakademik semasa perkuliahan telah membentuk Penulis menjadi pribadi yang berpengetahuan dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik.

MOTTO

“Dengan tanganku, kubantu aku. Tumbuh membaru dengan lukaku”

(Nadin Amizah)

“Saya hidup bukan untuk diri saya sendiri karena saya tahu dunia ini bukan hanya milik saya”

(Risma Oktavia)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud syukur dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka yang hadir dalam perjalanan hingga saat ini. Untuk keluarga, sahabat, dosen, dan semua yang telah memberi dukungan, serta seluruh pembaca.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam Menangani Permasalahan di Laut Sulu-Selawesi dan Perairan Lepas Pantai Sabah Bagian Timur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan penghormatan serta rasa terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan kebaikan hatinya selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, berdiskusi, memberikan masukan dan saran serta arahan kepada penulis dalam hal penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menginspirasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan melalui dukungan serta motivasi yang selalu diberikan.

5. Bapak Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan terbaik, serta menjadi teladan bagi penulis selama proses pendidikan di Universitas Lampung dan dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses pendidikan penulis di Universitas Lampung.
8. Untuk orang tuaku tersayang, Ibu Sumarni dan Bapak Asep Pranata, yang selalu mengusahakan penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala dukungan baik moral maupun material, serta selalu memanjatkan doa untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menjalani kehidupan ini. Dari banyaknya bahasa cinta di dunia ini, kita memiliki bahasa cinta yang berbeda. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
9. Kepada Almarhum Bapak Jaja Darwija, ayah kandung tercinta penulis, yang telah lebih dulu kembali kepada Allah SWT. Seseorang yang selamanya abadi dalam ingatan penulis dan sangat penulis rindukan di setiap harinya. Terima kasih atas segala kehidupan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini. Terima kasih karena telah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk selalu kuat menjalani kehidupan ini. Pada kehidupan yang hanya satu kali ini, sayangnya penulis belum sempat membuat beliau bangga. Semoga beliau selalu bahagia di Surga Allah SWT.
10. Teruntuk Appa (Bapak Ikhsan Mulyanto) dan Amma (Ibu Tuminem), Paman dan Bibi yang sudah penulis anggap sebagai orang tua bagi penulis. Terima kasih telah merawat penulis dari bayi hingga dewasa dengan segala kasih sayang yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan di hidup Appa dan Amma.

11. Untuk Mba Rima Nila Sari, Mba Zahra Chairani dan Mas Septian, saudara tersayang penulis. Terima kasih karena telah memberikan dukungan moral dan material, serta doa kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga dunia selalu memberikan bagian terbaiknya untuk kakak-kakak tersayang seperti baiknya mereka kepada penulis.
12. Do Kyungsoo, Choi Minho, Kim Jongin, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Oh Sehun, Kim Junmyeon, Kim Minseok, dan Kim Jongdae, terima kasih atas karya-karya yang selalu menghibur penulis di sela-sela kehidupan yang berat. Terima kasih karena telah menginspirasi penulis untuk terus hidup lebih baik dan semangat dalam mengejar mimpi-mimpi yang penulis impikan.
13. Sahabat penulis sejak kecil, Arifatun Khairu Nisa dan Fadila Anggraeni, yang selalu berbagi keluh kesah bersama hingga saat ini. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga hal-hal baik akan senantiasa hadir di hidup mereka.
14. Teman-teman masa SMP penulis, Syuhlatun Nadiyah, Aulia Dwi Andini, Dewi Nur Aprilia dan Devi Ristiani. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk bisa terus bersama dan berbagi suka duka hingga saat ini. Terima kasih karena telah menjadi teman yang terbaik bagi penulis di masa SMP, semoga kita bisa terus tertawa dan bahagia bersama.
15. Ajeng Fadilah Putri, sahabat tercinta penulis sejak duduk di bangku SMA hingga di perguruan tinggi. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat digantikan oleh Allah SWT dengan hal-hal yang lebih baik pula.
16. Untuk Nadzifa Maulidia Putri, Maria Lintang, Sabina Cahya Ramadhani, Enzel Naibaho dan Sania Agustina, sahabat tersayang yang pertama kali penulis temui di perantauan perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tiada hentinya. Semoga pertemanan ini akan selamanya terjalin dengan baik di antara kita.

17. Teman, sahabat sekaligus saudara, Kakak (Wanda Aulia Arifin), Assally (Assabilla Amesya Damarna), Mamas (Tito Prasetio Wicaksono), Dedek (M. Dhaniel Arnando) dan Neng (Oktavia), orang-orang yang tanpa sengaja penulis temui saat berada di perguruan tinggi dan menjadi sahabat dekat seperti saudara hingga saat ini. Terima kasih atas segala pertolongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah terus menjadi orang baik selama ini. Dari banyak manusia yang hidup di dunia ini, penulis merasa beruntung bisa bertemu dengan mereka. Semoga mereka selalu sehat dan bahagia selamanya.
18. Untuk Ajo (Aryo Pambudi), Anastasya Angella Szhasfha, Ade Nur Fitriyani, Tasya Aprilia Saputri, M. Dzakwan Alfero, Lulu Ayuning Pratiwi, dan Dwiki Citra Adama, teman-teman penulis diawal perkuliahan yang terbentuk dari tugas salah satu mata kuliah di semester satu. Terima kasih atas dukungan dan pengalaman baik dalam pertemanan yang tidak akan pernah penulis lupakan. Kedepannya, semoga hal-hal baik dapat terus menyertai mereka.
19. Keluarga Abhinava angkatan 2022, Tita Andina, Aldo Rizky, Fadhil Ramadhan, Zaky Pandala, Raditya Naufal, Elia Yusa, M. Algifari, Wahyu Dika dan M. Akbar, terima kasih telah memberikan pengalaman yang baik bagi penulis selama bergabung di HMJ-HI. Orang-orang baik yang senantiasa saling menolong dalam kesulitan dan memberikan saran terbaik. Bertemu dengan mereka adalah salah satu pengalaman baik yang tidak akan pernah penulis lupakan seumur hidup penulis.
20. Tsania Kholiza Nur Putri, sebagai teman dalam program magang MBKM di Kementerian Pertahanan RI. Terima kasih sudah selalu menemani dan mengajak penulis berkeliling Kota Jakarta bersama selama program magang.
21. Teman-teman seperbimbingan Hasbi's Children, Cyntia Apriani Ambarita dan Aldea Meisinta, yang selalu berbagi informasi terkait proses penulisan skripsi. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

22. Afiyah Nur Kamilah, Naila Fahsya Anindhiya, Jihan Aqila Altaf, Alda Thalita Cantik, Husnia Wulan Sari, Annisa Shafira, Siti Nurkholiza dan M. Ridwan, serta seluruh teman-teman angkatan 2022 yang telah hadir di dalam perjalanan penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
23. Seluruh pengurus pada Kabinet Abhinava HMJ-HI 2024/2025 dan teman-teman yang telah bergabung dalam kepanitiaan acara HMJ-HI Kabinet Abhinava, penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dalam menyukseskan acara yang sedang berjalan. Semoga dengan bergabung pada kegiatan Kabinet Abhinava dapat memberikan pengalaman yang baik bagi teman-teman semua.

Bandarlampung, 5 Juni 2026

Risma Oktavia

NPM. 2216071046

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Analisis	13
2.2.1 <i>Multilateral Cooperation</i>	13
2.2.2 <i>Defence Diplomacy Theory</i>	15
2.3 Kerangka Pemikiran	18
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24

3.5 Teknik Analisis Data	25
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil.....	28
4.1.1 Permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan Perairan Lepas Pantai Sabah Bagian Timur	28
4.1.2 Perkembangan Kondisi di Laut Sulu-Sulawesi dan Perairan Lepas Pantai Sabah Bagian Timur Tahun 2016-2025.....	33
4.1.3 Implementasi <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> (TCA) dalam Menangani Permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan Perairan Lepas Pantai Sabah Bagian Timur	43
4.1.3.1 <i>Trilateral Maritime Patrol</i> (TMP)	47
4.1.3.2 <i>Maritime Command Center</i> (MCC)	48
4.1.3.3 <i>Trilateral Air Patrol</i> (TAP).....	50
4.1.3.4 <i>Port Visit</i>	51
4.1.3.5 <i>Transit Corridors and Notice to Mariners</i> (NOTAM) oleh Filipina dan Malaysia.....	53
4.1.3.6 <i>Hot Pursuit</i>	56
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Analisis <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> dalam <i>Multilateral Cooperation</i>	58
4.2.2 Analisis <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i> dalam <i>Defence Diplomacy Theory</i>	63
4.2.3 Keterkaitan Konsep Multilateral dan Teori Diplomasi dalam Analisis <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i>	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73

5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Data Insiden Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia..... 5
- Grafik 2. Data Insiden Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Laut Sulu-Sulawesi dan Perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 2. Peta Lokasi Laut Sulu-Sulawesi dan Perairan lepas Pantai Sabah Bagian Timur	29
Gambar 3. Peta Jalur Transit Keluar dan Masuk RTC.....	35
Gambar 4. Peta Lokasi MCC di Ketiga Negara.....	48
Gambar 5. Peta Koridor Transit NOTAM Filipina dan Malaysia	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontak Pusat Operasi RTC dari Penjaga Pantai Filipina.....	36
Tabel 2. Kontak Penjaga Pantai Filipina dan Komando Keamanan Malaysia	37
Tabel 3. Pusat Tanggung Jawab Wilayah Filipina.....	54
Tabel 4. Pusat Tanggung Jawab Wilayah Malaysia.....	54
Tabel 5. Pusat Tanggung Jawab Wilayah Indonesia.....	55

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
AMF	: <i>ASEAN Maritime Forum</i>
AMI	: <i>Area Of Maritime Interest</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
ASPC	: <i>ASEAN Political Security Community</i>
BIMP-EAGA	: <i>Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area</i>
CBM	: <i>Confidence Building Measure</i>
CORPAT PHILINDO	: <i>Coordinated Patrol Philippines-Indonesia</i>
EiS	: <i>Eyes-in-the-Sky</i>
ESSCOM	: <i>Eastern Sabah Security Command</i>
FPDA	: <i>Five Power Defence Arrangement</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
ICC	: <i>International Chamber of Commerce</i>
IEG	: <i>Intelligence Exchange Group</i>
IFC	: <i>International Fusion Centre</i>
IITCA	: <i>Integrative, Interactive, Transparency, Controlling, Accountability</i>
IMB	: <i>International Maritime Bureau</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INDOMALPHI	: Indonesia, Malaysia, Philippines

JCC	: <i>Joint Coordinating Committee</i>
JTF	: <i>Joint Task Force</i>
KAS	: Kelompok Abu Sayyaf
KFRG	: <i>Kidnap-for-Ransom Group</i>
KRI	: Kapal Perang Republik Indonesia
MALSINDO	: Malaysia, Singapura, Indonesia
MCC	: <i>Maritime Command Center</i>
MPA	: <i>Maritime Patrol Aircraft</i>
MSP	: <i>Malacca Straits Patrol</i>
MSP-IS	: <i>Malacca Straits Patrol Information System</i>
MSSP	: <i>Malacca Strait Sea Patrol</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NCWC	: <i>National Coast Watch Center</i>
NOTAM	: <i>Notice to Airmen</i>
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCG	: <i>Philippine Coast Guard</i>
ReCAAP	: <i>Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia</i>
SEACAT	: <i>Southeast Asia Cooperation and Training</i>
TAG	: Turki, Azerbaijan, dan Georgia
TAP	: <i>Trilateral Air Patrol</i>
TBA	: <i>Tri Border Area</i>
TCA	: <i>Trilateral Cooperative Arrangement</i>
TMP	: <i>Trilateral Maritime Patrol</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VBSS	: <i>Visit Board Search and Seizure</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh aspek maritim, di mana hampir 80 persen dari total wilayahnya didominasi oleh lautan (Rantung, 2021). Wilayah laut yang luas memainkan peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional dan berfungsi sebagai tumpuan ekonomi bagi sekitar 60 persen masyarakat. Hampir 90 persen komoditas strategis dan kebutuhan energi diangkut melalui jalur laut di kawasan ini. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi, keamanan maritim di Asia Tenggara menghadapi ancaman yang perkembangannya semakin kompleks dan multidimensional (Rantung, 2021). Bahkan, muncul fenomena ancaman baru yang bersifat lintas batas negara dalam 10 sampai dengan 15 tahun terakhir. Ancaman-ancaman ini digolongkan sebagai masalah keamanan non-tradisional atau ancaman nyata (Primayanti *et al.*, 2020). Ancaman nyata dalam hal ini meliputi terorisme, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata dan perdagangan manusia, kejahatan siber, serta perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan. Lautan di kawasan Asia Tenggara pun dianggap sebagai jalur utama bagi kejahatan terbesar di dunia, dengan insiden perompakan (Rantung, 2021). Ancaman ini tidak hanya merugikan negara-negara pesisir, tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas keamanan dan ekonomi di tingkat regional maupun internasional. Salah satu wilayah rawan di kawasan Asia Tenggara adalah perairan Laut Sulu (Rustam *et al.*, 2022).

Laut Sulu yang terletak di kawasan Asia Tenggara, adalah area yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia,

dan Filipina (Wiswayana, 2023). Wilayah ini, yang juga dikenal sebagai *Tri Border Area* (TBA), menjadi salah satu rute perdagangan penting, sekaligus merupakan perairan yang sangat rawan dan berbahaya. Kawasan ini menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan senjata, dan terorisme maritim. Salah satu ancaman paling menonjol dan menimbulkan keresahan adalah penculikan awak kapal untuk meminta uang tebusan (Saraswati & Pinatih, 2020). Kelompok bersenjata yang mendominasi aksi kriminalitas maritim di wilayah ini adalah Kelompok Abu Sayyaf (KAS). Aksi penculikan warga negara Indonesia (WNI) oleh KAS di Laut Sulu telah terjadi sejak tahun 2002. Sebanyak sembilan WNI awak Kapal Tunda Christian disandera di Laut Sulu pada Desember 2004. Kerawanan keamanan di Laut Sulu mendorong negara-negara yang berbatasan di kawasan Laut Sulu untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut dan menjaga stabilitas maritim berkelanjutan (Rijal, 2019).

Kerja sama diawali melalui kerja sama bilateral antar-negara, terutama antara Indonesia dengan Filipina, lalu Indonesia dengan Malaysia, juga antara Filipina dan Malaysia. Indonesia dan Filipina menjalin kerja sama keamanan maritim melalui *Coordinated Patrol Philippines-Indonesia (Corpat Philindo)* yang didasari oleh Perjanjian Patroli Perbatasan tahun 1975. Kedua negara mengerahkan kekuatan militer secara terkoordinasi untuk mengamankan wilayah Kepulauan Nusa Utara, Indonesia dan Pulau Balut di wilayah Filipina dari berbagai potensi ancaman, seperti perompakan, terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya (Loing *et al.*, 2025). Operasi gabungan ini dilaksanakan secara rutin sebanyak empat kali dalam setahun yang mencakup tahap persiapan di pelabuhan (*harbour phase*) dan pelaksanaan patroli di laut (*sea phase*). Armada yang dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Filipina dalam periode operasi terbaru meliputi KRI Marlin-877, KRI Kakap-811, serta kapal korvet BRP Artemio Ricarte (PS-37) (Febrianto, 2024). Filipina juga turut mengerahkan pesawat pengangkut jenis *Maritime Patrol Aircraft* (MPA) NV394 untuk mendukung efektivitas pengamanan melalui pengawasan udara di jalur-jalur rawan kejahatan lintas batas. Selama menjalankan patroli di perbatasan, awak kapal kedua negara melaksanakan berbagai rangkaian latihan bersama, mulai dari latihan manuver,

komunikasi isyarat *semaphore*, hingga prosedur *Visit Board Search and Seizure* (VBSS).

Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam pengamanan jalur laut melalui melalui *Malacca Strait Patrols* (MSP) yang diresmikan sejak tahun 2004 sebagai kelanjutan dari kerja sama Malaysia, Singapura, dan Indonesia (Malsindo). Pembentukan inisiatif ini didasari oleh tanggung jawab bersama ketiga negara dalam menjamin keselamatan pelayaran dan menanggulangi ancaman perompakan bersenjata serta terorisme maritim di Selat Malaka (Rakhmagina & Shiddiqy, 2025). Indonesia memandang kerja sama ini sebagai mekanisme penting untuk menegaskan kedaulatan wilayah tanpa intervensi kekuatan militer asing yang bersifat langsung. Malaysia mengedepankan sinergi operasional melalui koordinasi yang teratur untuk memastikan stabilitas keamanan jalur komunikasi dan perdagangan laut di kawasan tersebut. Struktur operasional MSP terdiri atas tiga pilar utama, yakni patroli laut *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), patroli udara *Eyes-in-the-Sky* (EiS), dan pertukaran informasi intelijen melalui *Intelligence Exchange Group* (IEG).

Pemanfaatan *platform* digital *Malacca Straits Patrol Information System* (MSP-IS) memungkinkan kedua negara berbagi data maritim secara cepat untuk mendeteksi perilaku kapal yang mencurigakan. Melalui kerja sama strategis dari kolaborasi pada tahun 2006 *Lloyd's Joint War Risk Committee* mencabut status Selat Malaka sebagai area risiko perang (Suaimi RMN, 2023). Menurut data *International Chamber of Commerce International Maritime Bureau* (ICC IMB) tahun 2021 keberhasilan penekanan angka kriminalitas di Selat Malaka mencapai nol insiden sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Indonesia terus memperkuat kontribusi data intelijen dalam sistem MSP-IS yang tercatat meningkat dari angka 15 persen pada tahun 2014 menjadi 30 persen pada tahun 2018 (Yudha & Wiswayana, 2025). Melalui pertemuan rutin dalam *Joint Coordinating Committee* (JCC), Indonesia dan Malaysia terus berupaya MSP tetap menjadi model kerja sama praktis yang efektif dalam menjaga keamanan maritim regional.

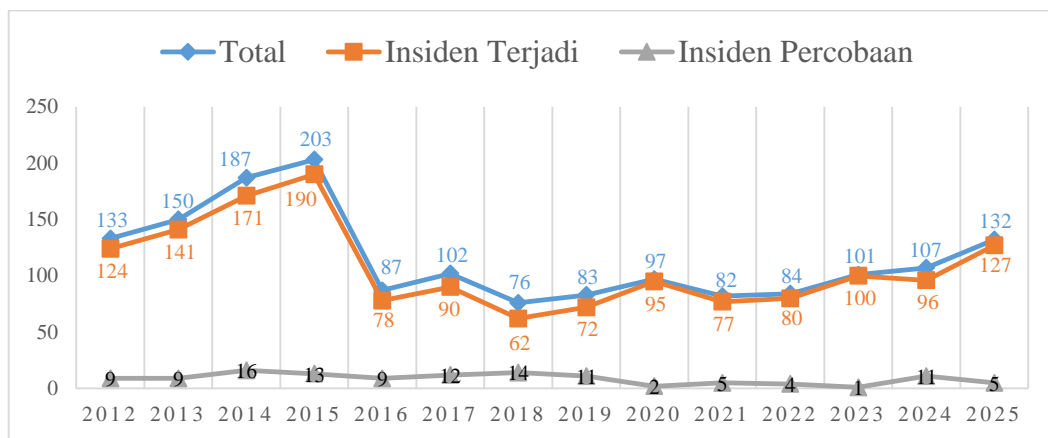
Indonesia, Malaysia, dan Filipina pun menyepakati bekerja sama dalam memperkuat keamanan maritim kawasan melalui latihan multilateral *Southeast Asia*

Cooperation and Training (SEACAT) yang pertama kali dibentuk pada tahun 2002. Program ini pada awalnya bernama *Southeast Asia Co-operation Against Terrorism* yang diinisiasi sebagai respons terhadap serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat (Morris & Persi Paoli, 2018). Selain melibatkan Amerika Serikat, SEACAT juga diikuti negara-negara regional lain di Laut Phuket, Thailand. Pada tahun 2012, nama latihan resmi berganti untuk memperluas cakupan pelatihan guna menghadapi tantangan keamanan nontradisional yang lebih luas, seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal (Fulton, 2017). Pelaksanaan kegiatan tahunan ini terbagi dalam dua tahap utama, yakni *shore phase* yang berisi seminar perencanaan serta *sea phase* untuk mempraktikkan simulasi pelacakan dan intersepsi terhadap kapal mencurigakan secara nyata. *International Fusion Centre* (IFC) di Singapura berfungsi sebagai pusat koordinasi krisis dan pertukaran data informasi intelijen secara aktual bagi seluruh negara peserta selama latihan berlangsung.

Penggunaan teknologi *SeaVision* menjadi informasi penting dalam latihan ini karena membantu personel militer memvisualisasikan data ranah kelautan serta melacak keberadaan kapal-kapal gelap atau *dark vessels* (Sandoval, 2025). Pada tahun 2021, SEACAT berhasil melibatkan partisipasi dari 21 negara dengan mengerahkan 10 unit kapal perang serta lebih dari 400 personel (Chatmas, 2021). Pada tahun 2025 di peringatan ke-24 tahun, latihan ini melibatkan 12 negara yang memfokuskan pada pengujian integritas berbagi intelijen guna mendeteksi serta menanggapi aktivitas maritim ilegal sesuai hukum internasional. Melalui keberlanjutan kerja sama SEACAT, Indonesia, Malaysia, dan Filipina berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menjaga stabilitas keamanan perairan di Asia.

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) merupakan perjanjian internasional pertama di Asia yang secara khusus menangani pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal (ReCAAP, 2019). Perjanjian ini mulai berlaku pada November 2006. ReCAAP membentuk sebuah pusat berbagi informasi yang dikenal sebagai *ReCAAP Information Sharing Centre* (ReCAAP ISC) dan berkedudukan di Singapura. Pusat ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi insiden

kejahatan maritim kepada seluruh negara anggota secara rutin. Mekanisme pelaporan ReCAAP mewajibkan setiap negara anggota menyampaikan laporan insiden secara terstandar dan tepat waktu. Laporan tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan insiden, mulai dari insiden aktual hingga percobaan serangan. Data yang dikumpulkan ReCAAP kemudian diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan yang menjadi rujukan utama bagi negara-negara di Asia dalam menilai kondisi keamanan maritim. Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan tiga negara anggota aktif yang secara konsisten berkontribusi dalam mekanisme pelaporan ReCAAP ISC.



Grafik 1. Data Insiden Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia
Sumber: ReCAAP, 2025

Dari grafik 1 di atas, terlihat jumlah insiden pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Asia mengalami penurunan di tahun 2016 bila dibandingkan dengan periode 2012-2015 (ReCAAP, 2016). Meskipun pada tahun 2016, jumlah insiden pembajakan dan perampokan bersenjata lebih rendah, tetapi sejak Maret 2016, insiden penculikan awak kapal untuk meminta tebusan oleh Kelompok Abu Sayyaf (KAS) di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur menjadi perhatian karena adanya laporan insiden di tahun 2016 yang belum pernah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, KAS melakukan aksi penculikan terhadap warga negara Indonesia (WNI) sebanyak 24 orang, warga negara Malaysia sebanyak sembilan orang, warga negara Filipina delapan orang, serta enam orang warga negara asal Vietnam, dan satu orang warga negara Korea (ReCAAP,

2016). Dengan aksinya, KAS menjadi kelompok bersenjata yang mendominasi aksi kriminalitas maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur (Wiswayana, 2023). Oleh karenanya, Indonesia, Malaysia dan Filipina berupaya untuk menangani kasus kejahatan tersebut pada pertengahan tahun 2016 (Wiswayana, 2023). Pada tanggal 5 Mei 2016, Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina melakukan pembicaraan kerja sama yang lebih spesifik mengenai kerja sama trilateral yang kenal dengan sebutan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) atau kerja sama Indomalphi sebagai respons Insiden yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.

Penelitian ini penting dan layak dilakukan karena Laut Sulu-Sulawesi merupakan jalur pelayaran strategis ALKI II yang membawa kargo bernilai sekitar 40 miliar USD setiap tahunnya, tetapi juga merupakan wilayah perairan paling berbahaya kedua di Asia Tenggara setelah Selat Malaka (Rantung, 2021). Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta empiris mengenai tingginya ancaman kejahatan transnasional, khususnya aksi penculikan awak kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf (KAS) yang mencapai titik tertinggi pada tahun 2016. Pemilihan periode penelitian tahun 2016 hingga 2025 didasarkan pada justifikasi empiris yang bersumber dari data resmi yang dilaporkan kepada ReCAAP ISC. Insiden pertama yang menjadi perhatian internasional dilaporkan pada Maret 2016, ketika kapal tunda Brahma Dua Belas diserang dan sepuluh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf. Laporan insiden tersebut disampaikan kepada ReCAAP ISC dan menjadi sinyal peringatan bahwa modus kejahatan di kawasan ini telah bergeser dari perompakan biasa menjadi penculikan awak kapal untuk meminta uang tebusan. Peningkatan kejahatan yang terdokumentasi dalam laporan ReCAAP inilah yang mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk segera merespons dengan membentuk *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada Mei 2016.

Perjalanan sepuluh tahun ini menandai evolusi TCA dari sekadar deklarasi politik menjadi sistem keamanan maritim yang operasional. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fokus utama kajian selama ini adalah pada evaluasi

efektivitas kerangka kerja sama dalam menekan angka kriminalitas maritim. Berbagai literatur menjelaskan bahwa TCA merupakan strategi yang sukses karena berhasil menurunkan jumlah insiden pembajakan dan penyanderaan secara signifikan, terutama pada periode 2017-2019 setelah peluncuran patroli laut dan udara terkoordinasi. Justifikasi utama kelayakan penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan literatur, dimana kebanyakan penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan rentang waktu, yaitu analisis hanya mencakup data hingga tahun 2018 atau 2019 sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan kerja sama ini hingga tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian yang membahas mengenai proses implementasi TCA secara mendalam untuk kurun satu dasawarsa (2016-2025) masih dinilai terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Ancaman keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur, yang bersinggungan langsung dengan batas wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, telah menjadi perhatian serius karena wilayah ini adalah salah satu rute perdagangan penting di Asia Tenggara. Ancaman tersebut meliputi pembajakan, perampokan bersenjata, penculikan awak kapal untuk meminta uang tebusan, dengan KAS sebagai aktor utama dalam aksi penyanderaan dan penculikan. Insiden penculikan anak buah kapal (ABK) mencapai titik tertinggi pada tahun 2016, sebuah situasi yang mendesak ketiga negara untuk melakukan pembicaraan kerja sama yang lebih spesifik untuk menangkal gangguan keamanan. Upaya ini menghasilkan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), yang dirumuskan setelah pembicaraan intensif sejak 2016 dan disepakati pada tahun 2017. Namun, sebagian besar penelitian yang mengkaji kerja sama ini cenderung membahas mengenai efektivitas kerangka kerja sama tersebut dalam menekan angka kejahatan maritim. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: **Bagaimana implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam menangani permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur periode 2016-2026?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.
2. Mendeskripsikan implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam menangani permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis, yakni :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika kerja sama keamanan maritim, khususnya pada interaksi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam merespons berbagai ancaman di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Secara lebih spesifik, penelitian ini diproyeksikan untuk menambah serta memperkaya literatur akademis mengenai strategi kolaboratif negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman transnasional. Dengan menggunakan kerangka konsep kerja sama multilateral dan teori diplomasi pertahanan, studi ini berupaya menjelaskan bagaimana kerja sama multilateral diimplementasikan sebagai proses diplomasi pertahanan transformasional guna menjaga stabilitas maritim secara kolektif.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) guna menangani permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas mekanisme operasional seperti patroli laut

dan udara terkoordinasi, pembentukan *National Focal Point* untuk berbagi informasi intelijen, serta penggunaan *hotline* dalam merespons keadaan darurat. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi institusi pertahanan mengenai pentingnya instrumen diplomasi pertahanan, seperti latihan militer gabungan (*Joint Military Exercise*), kunjungan kapal (*Port Visit*), dan kegiatan pembangunan rasa percaya (*Confidence Building Measure*), dalam memperkuat kerja sama untuk menanggulangi ancaman nyata dari kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan (*Tri Border Area*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka disusun sebagai landasan konseptual yang fundamental untuk memperkuat analisis melalui kajian literatur. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap dinamika kerja sama keamanan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, khususnya mengenai *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Kajian ini juga mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang membahas isu kerja sama trilateral, khususnya di sektor keamanan maritim dan regional. Analisis mendalam terhadap penelitian terdahulu ini memungkinkan penulis melihat temuan-temuan relevan terkait efektivitas dan tantangan kerja sama keamanan trilateral. Penulis selanjutnya dapat menemukan temuan-temuan penting sebagai kebaruan penelitian yang dilakukan dari studi literatur yang telah ada.

Berdasarkan hasil pengelompokan penelitian terdahulu, sejumlah literatur menjelaskan bahwa kerja sama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) adalah mekanisme penting dalam menanggulangi ancaman keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. TCA merupakan strategi sukses sebab kasus perompakan menurun secara signifikan (Rantung, 2021). Penelitian oleh Tumilaar *et al.* (2025) menemukan kerja sama trilateral berhasil mengurangi insiden kejahatan maritim di Laut Sulu. Operasi *Trilateral Maritime Patrol* efektif menekan ancaman penculikan dan pembajakan (Dirgantara *et al.*, 2020). Angkatan Laut ketiga negara berhasil menegakkan *sea control* melalui operasi yang terkoordinasi ini. Penelitian Primayanti *et al.* (2020) mencatat TCA memberikan efek

gentar (*deterrence*) terhadap kejahatan asimetris. Patroli terkoordinasi yang dilakukan ketiga negara juga dinilai dapat mengurangi maritime piracy di Laut Sulu secara nyata (Saraswati & Pinatih, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana *and* Wijaya (2022) menjelaskan kedekatan geografis mendorong pola persahabatan antarnegara yang efektif. Rezim TCA juga efektif mengurangi aksi Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu (Rustam *et al.*, 2022). Penelitian Atamimi *and* Azzqy (2020) melaporkan, TCA melalui TMP, TAP, dan MCC menghasilkan hasil positif yang cepat dalam waktu satu tahun dengan terlihatnya penyusutan angka kejahatan di Laut Sulu.

Beberapa literatur menyoroti tentang strategi dan diplomasi pertahanan TCA. Penelitian oleh Wirawan *et al.* (2022) menjelaskan strategi TCA dicapai dengan fokus ganda dalam diplomasi pertahanan. Fokus pertama adalah membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measure* atau CBM) melalui serangkaian pertemuan untuk menyamakan persepsi. Fokus kedua adalah meningkatkan kapabilitas pertahanan melalui latihan militer bersama (*Joint Military Exercise*). Chaer *et al.* (2021) turut menekankan skema *Port Visit* sangat krusial untuk membangun CBM dan memperkuat *capacity building*. Strategi TCA dapat berhasil jika memenuhi lima karakteristik implementasi kebijakan pertahanan (IITCA) (Aliyah *et al.*, 2024). Karakteristik tersebut meliputi unsur integratif, interaktif, transparan, kontrol, dan akuntabilitas. Joanita (2019) menyimpulkan TCA merupakan hasil diplomasi pertahanan Indonesia yang berhasil menanggulangi ancaman keamanan Laut Sulu.

Model kerja sama trilateral lain, seperti yang terjadi di kawasan Kaukasus Selatan (TAG), juga dipandang berhasil dalam memperkuat integrasi ekonomi dan arsitektur keamanan regional. Penelitian yang dilakukan oleh Yildirim (2025) menemukan bahwa kerja sama trilateral Turki, Azerbaijan, dan Georgia (TAG) menciptakan integrasi ekonomi signifikan. Integrasi ini terwujud melalui megaprojek energi dan transportasi yang memperkuat arsitektur keamanan regional. Kerja sama trilateral merupakan mekanisme pertahanan diri (*self-aid*) merespons tantangan ekonomi dan keamanan (Jajanidze, 2022). Kerja sama tersebut harus selaras dengan kepentingan nasional semua pihak dan tidak ditujukan melawan negara ketiga untuk sukses. Frappi *and* Valigi (2025) melihat stabilitas sistem tiga aktor (triad) ini terjadi

bila tidak ada satu aktor pun mendominasi yang lain. Model TAG krusial bagi negara-negara yang terkurung daratan (*landlocked states*) karena membantu akses ke pasar. Keberlanjutan kerja sama trilateral ini mesti didasarkan pada penghormatan timbal balik terhadap kedaulatan teritorial.

Sejumlah penelitian membahas mengenai hambatan, tantangan, dan kerangka umum kerja sama trilateral. Penelitian Ohn *and* Richey (2014) menunjukkan keberhasilan kerja sama trilateral bergantung pada adanya pengakuan bersama dan kepercayaan umum. Kerja sama ini lebih mudah diterapkan pada isu yang tidak menyentuh kedaulatan teritorial atau maritim. Namun, aksi Kelompok Abu Sayyaf justru meningkat di tengah tekanan kerja sama *counter piracy* (Rosadi, 2019). Peningkatan ini terjadi karena adanya hambatan berupa konflik internal berkepanjangan di Filipina yang menjadi penghalang utama. Pradityo (2024) menegaskan operasionalisasi TCA didorong oleh kehadiran ancaman ketidakamanan maritim yang sifatnya kompleks. Oleh sebab itu, upaya penguatan kerja sama difokuskan pada integrasi intelijen untuk mengantisipasi jaringan kriminal transnasional. Penelitian yang dilakukan oleh Andalus *et al.* (2023) menemukan ketidakpercayaan dan perbedaan paradigma penanganan terorisme masih menjadi hambatan. Wiswayana (2023) mencatat bahwa masa berlaku dan pengukuran keberhasilan TCA tidak dijelaskan spesifik dalam *Joint Declaration*.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan konseptual yang fundamental untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini melalui kajian literatur yang komprehensif. Dengan menelaah temuan-temuan sebelumnya, peneliti dapat memetakan efektivitas dan tantangan dalam kerja sama keamanan trilateral, seperti keberhasilan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam menurunkan angka perompakan secara signifikan pada periode tertentu. Secara spesifik, literatur terdahulu memberikan kontribusi berupa identifikasi strategi diplomasi pertahanan, seperti pentingnya pembangunan rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*), latihan militer bersama (*Joint Military Exercise*), dan skema *Port Visit*. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti mengidentifikasi berbagai hambatan operasional, mulai dari perbedaan paradigma penanganan terorisme, konflik internal di negara anggota,

hingga masalah kepercayaan antarnegara yang menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan kerja sama. Melalui studi literatur ini, peneliti dapat menemukan celah penelitian yang belum terisi untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan kebaruan.

Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada pergeseran fokus analisis yang tidak lagi sekadar mengevaluasi efektivitas hasil, melainkan mendalami proses implementasi kebijakan pertahanan secara menyeluruh. Jika sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada pencapaian angka penurunan kriminalitas maritim atau efektivitas kerangka kerja sama dalam jangka pendek, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan membedah mekanisme operasional TCA sebagai suatu proses diplomasi pertahanan transformasional. Selain itu, penelitian ini menawarkan keunggulan pada rentang waktu analisis yang lebih komprehensif, yakni mencakup satu dasawarsa penuh mulai dari inisiasi pada tahun 2016 hingga tahun 2025. Hal ini melampaui keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas hanya menyajikan data hingga tahun 2018 atau 2019, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai evolusi dan keberlanjutan sistem keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur dalam jangka panjang.

2.2 Kerangka Analisis

2.2.1 *Multilateral Cooperation*

Konsep kerja sama multilateral merupakan kerangka utama dalam menganalisis dinamika koordinasi antarnegara di sistem internasional. Keohane (1990) mendefinisikan multilateralisme sebagai praktik penting yang mengoordinasikan kebijakan nasional dalam kelompok yang melibatkan tiga negara atau lebih. Keohane menjelaskan bahwa koordinasi ini dapat terwujud melalui pengaturan *ad hoc* jangka pendek atau melalui institusi formal yang terlembagakan. Institusi multilateral telah menjadi semakin penting dalam politik dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II, ditandai dengan peningkatan jumlah organisasi dan konferensi. Dalam literatur Hubungan Internasional, multilateralisme telah berfungsi sebagai label untuk berbagai

aktivitas, tetapi Keohane ingin menjadikannya sebagai konsep yang mendefinisikan program penelitian. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara mendalam mengenai bagaimana konsep ini harus dikonsepsikan sebelum fenomena multilateralisme dapat dideskripsikan dan dijelaskan sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk menentukan beberapa dimensi spesifik dari multilateralisme guna mengidentifikasi variasi dalam tingkat atau bentuknya.

Ruggie (1992) mendefinisikan multilateralisme sebagai bentuk koordinasi hubungan tiga negara atau lebih. Beliau menekankan kualitas hubungan antarnegara daripada sekadar jumlah peserta kerja sama. Konsep multilateral Ruggie menekankan pada kualitas hubungan daripada sekadar jumlah peserta negara. Ruggie menyatakan bahwa multilateralisme arsitektural menuntut tidak adanya pengingkaran diri dari negara. Negara harus menahan diri dari mengejar keuntungan sepihak demi stabilitas sistem internasional. Konsep ini membedakan multilateralisme dari sekadar bentuk kerja sama nominal. Ruggie membedakan institusi multilateral konvensional dengan gagasan arsitektural yang lebih mendalam. Terdapat tiga elemen utama yang membentuk arsitektur institusi multilateral menurut Ruggie.

Konsep arsitektur Ruggie mensyaratkan bahwa unit-unit yang terlibat terhubung secara tak terpisahkan (*indivisibly linked*) dalam operasional MCC ketiga negara. Elemen keterikatan tak terpisahkan menyatakan bahwa unit anggota terhubung secara fungsional. Prinsip ini mengharuskan setiap anggota untuk bertindak demi kepentingan kolektif bersama. Negara-negara harus menanggapi situasi krisis secara bersama-sama tanpa adanya pengecualian khusus. Dalam sistem keamanan kolektif, serangan kepada satu negara merupakan serangan bersama. Konsep ini menuntut kesiapan negara untuk memberikan respons kolektif tanpa persyaratan. Keamanan dipandang sebagai barang publik yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota. Ruggie mencontohkan NATO sebagai institusi yang menerapkan prinsip *indivisibly linked* ancaman kolektif. Setiap anggota terikat oleh kewajiban untuk saling membantu dalam menghadapi ancaman. Kesetaraan hak perlindungan menjadi fondasi utama dalam arsitektur keamanan multilateral tersebut.

Selain itu, interaksi antar unit didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang bersifat umum (*generalized principles of conduct*) seperti pada mekanisme *hot pursuit*, bukan kesepakatan spesifik. Prinsip perilaku umum mengoordinasikan hubungan tanpa memandang kepentingan spesifik setiap aktor. Hal ini berarti setiap anggota institusi wajib mengikuti aturan yang setara. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh tindakan tanpa melihat kondisi khusus. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam interaksi antarnegara anggota. Ruggie (1992) memisahkan prinsip ini dari kesepakatan bilateral yang bersifat sangat situasional. Interaksi antarnegara didasarkan pada standar perilaku yang berlaku secara universal. Prinsip tersebut mengabaikan tuntutan strategis jangka pendek anggota. Negara-negara terikat oleh aturan baku yang mengatur perilaku mereka secara konsisten (Ruggie, 1992).

Prinsip penting lainnya adalah ketergantungan pada harapan timbal balik yang menyebar (*diffuse reciprocity*) pada kontribusi strategis, bukan timbal balik yang spesifik (*specific reciprocity*) (Ruggie, 1992). Harapan timbal balik menyebar mendorong anggota agar tetap berkontribusi secara konsisten. Para anggota mengharapkan adanya keseimbangan manfaat dalam kerja sama dan jangka panjang. Timbal balik menyebar menjadi faktor penentu bagi keberhasilan kerja sama multilateral berkelanjutan. Rasa saling percaya antar unit anggota sangat diperlukan untuk menjalankan prinsip tersebut. Ruggie (1992) menyatakan bahwa suksesnya multilateralisme bergantung pada ekspektasi manfaat jangka panjang.

2.2.2 Defence Diplomacy Theory

Cottey dan Forster (2004), peneliti terkemuka dalam bidang diplomasi pertahanan mengemukakan definisi yang fleksibel dan ekspansif untuk konsep diplomasi pertahanan. Mereka mendefinisikannya sebagai penggunaan damai (non-konfrontasional) dari angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait, terutama kementerian pertahanan sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan. Definisi ini memperluas ruang lingkupnya, dengan mempertimbangkan peran Kementerian Pertahanan serta penggunaan atase pertahanan untuk mencegah konflik. Fokus utama diplomasi pertahanan adalah pada pembentukan bersama dan implementasi kebijakan

keamanan negara secara stabil dan jangka panjang (Muniruzzaman, 2020). Konseptualisasi yang jelas dari istilah ini merupakan titik awal yang krusial untuk memahami perannya sebagai salah satu instrumen terpenting bagi kebijakan luar negeri negara-negara modern.

Tan dan Singh (2012) mengemukakan teori diplomasi pertahanan dalam studi keamanan. Diplomasi pertahanan merupakan penerapan kolektif dari inisiatif militer secara damai. Instrumen ini digunakan oleh lembaga pertahanan nasional secara kooperatif dan pasifik. Pemanfaatan kekuatan militer ditujukan untuk membangun rasa kepercayaan antar negara. Penciptaan rasa percaya menjadi elemen krusial dalam hubungan diplomatik regional. Pencegahan konflik dilakukan melalui koordinasi aktif antara praktisi militer profesional. Resolusi konflik tercapai melalui aplikasi inisiatif damai pada tingkat internasional. Konsep ini menekankan penggunaan damai dari angkatan bersenjata negara.

Diplomasi pertahanan muncul untuk menjawab kompleksitas strategis pasca Perang Dingin (Tan & Singh, 2012). Ketidakpastian lingkungan global mendorong negara mencari bentuk kerja sama baru. Tantangan keamanan non-tradisional menjadi fokus perhatian utama bagi penanggungjawab keamanan. Masalah lintas batas memerlukan pendekatan multilateral dalam pengelolaan pertahanan nasional. Peran militer berevolusi untuk menghadapi ancaman keamanan bersifat multidimensional saat ini. Kerja sama pertahanan menjadi alat kebijakan luar negeri yang penting. Kebijakan luar negeri memanfaatkan instrumen militer untuk mencapai tujuan keamanan. Diplomasi pertahanan menciptakan hubungan internasional yang stabil dalam jangka panjang.

Tan dan Singh (2012) menggarisbawahi fungsi diplomasi pertahanan secara kolektif, terutama dalam konteks Asia, yaitu untuk mempromosikan pembangunan rasa percaya, penciptaan kepercayaan, pencegahan konflik dan resolusi konflik. Mereka membedakan dua fungsi utama: fungsi pragmatis dan fungsi transformasional. Fungsi pragmatis berfokus pada pemeliharaan kondisi kerja sama dan keamanan yang sudah ada di antara dua atau lebih negara. Sebaliknya, fungsi transformasional diarahkan pada implementasi tugas terkait resolusi krisis dan pemulihan keseimbangan keamanan. K.

A. Muthanna (2011) dalam penelitian Muniruzzaman (2020) menambahkan bahwa diplomasi pertahanan bertujuan membangun hubungan kooperatif yang berkelanjutan, memfasilitasi pencegahan konflik, memperkenalkan transparansi, dan mengubah pola pikir mitra. Secara keseluruhan, peran diplomasi pertahanan adalah untuk membentuk hubungan militer antar negara, melalui negosiasi dan teknik yang tidak meningkatkan konflik (Drab, 2018).

Implementasi diplomasi pertahanan mencakup tiga tingkatan interaksi militer yang berbeda (Tan & Singh, 2012). Tingkat strategis melibatkan pertemuan forum tingkat menteri secara rutin berkala. Tingkat operasional mencakup interaksi antar pimpinan tertinggi angkatan bersenjata negara. Perwakilan militer melakukan pertukaran informasi secara teknis melalui jaringan komunikasi. Tingkat taktis diimplementasikan melalui latihan militer serta pertukaran personel lapangan. Seluruh tingkatan interaksi ini membentuk kerangka kerja sama pertahanan komprehensif. Berbagai instrumen juga digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi pertahanan secara maksimal. Penerapan kolektif bertujuan membangun kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik bersenjata.

Penelitian ini mengintegrasikan konsep kerja sama multilateral dan teori diplomasi pertahanan sebagai landasan analisis untuk membedah implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Melalui konsep kerja sama multilateral, TCA dipahami sebagai bentuk koordinasi nasional dalam kelompok terbatas yang terdiri dari tiga negara. Pilar-pilar utama dalam konsep multilateral yang akan digunakan meliputi: (1) hubungan yang tak terpisahkan antar unit (*indivisibly linked*), (2) penggunaan prinsip-prinsip perilaku yang bersifat umum, serta (3) adanya harapan timbal balik yang menyebar (*diffuse reciprocity*). Dalam hal ini, TCA diklasifikasikan sebagai institusi terbatas (*limited institution*) yang sengaja membatasi keanggotaannya untuk mencapai tujuan keamanan bersama di wilayah perbatasan (*Tri Border Area*).

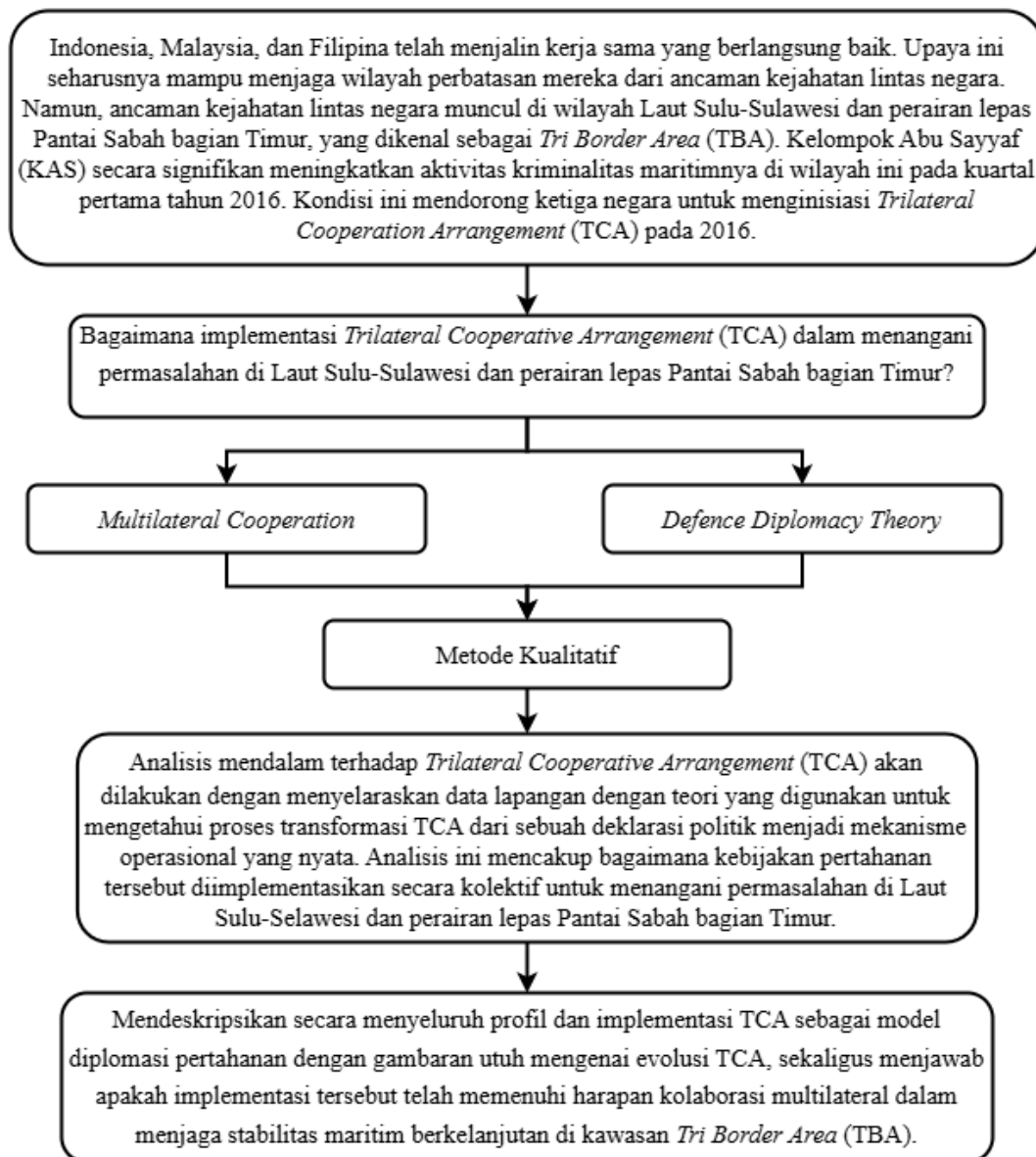
Di sisi lain, teori diplomasi pertahanan digunakan untuk menjelaskan penggunaan instrumen militer secara damai dan non-konfrontasional sebagai alat kebijakan luar negeri. Pilar analisis dalam teori ini mencakup dua fungsi utama, yaitu

fungsi pragmatis untuk memelihara kerja sama yang sudah ada, serta fungsi transformasional yang difokuskan pada penyelesaian krisis dan pemulihan keseimbangan keamanan di kawasan. Operasionalisasi dari teori ini akan ditinjau melalui instrumen-instrumen seperti patroli terkoordinasi (laut dan udara), port visit, serta kegiatan pembangunan rasa percaya (*Confidence Building Measure*). Dengan menggabungkan kedua kerangka tersebut, penelitian ini secara utuh akan menjelaskan bagaimana kerja sama multilateral diimplementasikan sebagai proses diplomasi pertahanan transformasional guna menjaga stabilitas maritim dan menanggulangi ancaman lintas negara secara bersama di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran, penulis akan menguraikan isu krusial mengenai ancaman keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Wilayah ini, yang juga dikenal sebagai *Tri Border Area* (TBA), yang merupakan jalur pelayaran yang sangat ramai, tetapi juga rawan kejahatan transnasional. Ancaman di perairan ini bervariasi, meliputi terorisme, penyelundupan, perompakan, dan kejahatan transnasional lainnya, dimana pada kuartal pertama tahun 2016, Kelompok Abu Sayyaf (KAS) secara intensif meningkatkan aksi kriminalitas maritimnya di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Modus kejahatan KAS bergeser dari perompakan menjadi penyanderaan untuk meminta uang tebusan. Situasi keamanan yang mendesak ini, terutama setelah serangkaian pembajakan kapal berbendera Indonesia, mendorong ketiga negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menginisiasi kerja sama yang lebih spesifik dan terkoordinasi. Upaya ini menghasilkan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), yang merupakan mekanisme penting dalam menanggulangi ancaman keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Dalam menganalisis fenomena kerja sama TCA dan mendeskripsikan upaya yang dilakukannya terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur, penelitian ini menggunakan dua kerangka analisis

utama: Konsep Kerja Sama Multilateral (*Multilateral Cooperation*) dan Teori Diplomasi Pertahanan (*Defence Diplomacy Theory*). Melalui kerangka ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan upaya TCA dengan menjelaskan bagaimana kerja sama multilateral yang bersifat terbatas diimplementasikan sebagai proses diplomasi pertahanan transformasional untuk secara kolektif menjaga stabilitas maritim berkelanjutan dan menanggulangi ancaman multidimensional di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini menekankan. Miles *et al.* (2014) mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai kerajinan yang memerlukan disiplin dan metode eksplisit untuk mencapai kesimpulan yang kredibel. Kebanyakan analisis dalam studi kualitatif melibatkan kata-kata, baik dari dokumen tertulis atau observasi, bukan hanya angka. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kerja sama keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.

Jenis penelitian kualitatif ini dipilih karena sangat relevan untuk menganalisis *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Isu TCA merupakan fenomena diplomasi pertahanan yang kompleks dan melibatkan dinamika kolaborasi tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam bagaimana upaya TCA terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Pendekatan ini memfasilitasi identifikasi temuan-temuan penting terkait pelaksanaan TCA. Peneliti berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana upaya TCA menangani ancaman transnasional, seperti perompakan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menyumbang pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kerja sama yang terjalin.

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan langkah krusial dalam merancang studi kualitatif secara sistematis (Miles *et al.*, 2014). Dalam penelitian kualitatif, fokus ini seringkali diwujudkan melalui pertanyaan penelitian sentral (*central question*) yang luas. Fokus penelitian harus ditentukan secara eksplisit agar kerangka teoretis awal menjadi lebih nyata dan terarah. Penentuan fokus membantu peneliti dalam membatasi pengumpulan data agar tetap efisien dan relevan. Selain itu, fokus penelitian menetapkan batasan subjek yang akan diteliti secara jelas di lapangan. Fokus penelitian ini adalah upaya *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) terkait penyelesaian permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. TCA ini berfungsi sebagai unit analisis utama yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Pembatasan fokus pada TCA dan upaya spesifiknya membantu peneliti mengarahkan pengumpulan data yang efisien. Peneliti fokus pada aspek-aspek kunci yang tercakup dalam TCA, yaitu diplomasi pertahanan dan respons terhadap ancaman transnasional. Batas-batas kasus ini mencakup entitas negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerangka kerja TCA. Penentuan fokus yang jelas ini sangat penting untuk mencegah peneliti dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian TCA.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada upaya *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam menyelesaikan permasalahan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur, di mana TCA diposisikan sebagai unit analisis utama. Batasan kasus ini mencakup koordinasi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerangka kerja TCA untuk merespons ancaman transnasional, seperti perompakan dan penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf (KAS) di wilayah perbatasan (*Tri Border Area*). Secara teoretis, fokus penelitian ini dijabarkan melalui pilar-pilar dari konsep kerja sama multilateral dan teori diplomasi pertahanan. Dalam kerangka multilateralisme, analisis diarahkan pada posisi TCA sebagai institusi terbatas (*limited institution*) yang melibatkan hubungan tak terpisahkan antar unit (*indivisibly linked*), penerapan prinsip-prinsip perilaku yang bersifat umum, serta adanya harapan timbal balik yang menyebar (*diffuse reciprocity*).

Sementara itu, melalui lensa diplomasi pertahanan, penelitian memfokuskan pada fungsi pragmatis untuk memelihara kerja sama serta fungsi transformasional untuk penyelesaian krisis di kawasan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap instrumen operasional seperti patroli terkoordinasi (laut dan udara), latihan militer gabungan (*Joint Military Exercise*), kunjungan kapal (*Port Visit*), serta kegiatan pembangunan rasa percaya (*Confidence Building Measure*).

Selain pilar teori, penelitian ini membatasi analisisnya pada implementasi TCA dalam rentang waktu satu dasawarsa penuh, yakni mulai dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2025. Fokus pada periode sepuluh tahun ini sangat penting untuk menggambarkan evolusi TCA secara menyeluruh, dari sekadar deklarasi politik menjadi sistem keamanan maritim yang operasional. Dengan cakupan waktu tersebut, penelitian ini mampu menawarkan kebaruan dengan mendalami proses implementasi kebijakan pertahanan secara menyeluruh, dibandingkan literatur terdahulu yang mayoritas hanya menyajikan evaluasi efektivitas hasil atau angka penurunan kriminalitas dalam jangka waktu yang lebih pendek.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dianalisis biasanya berbentuk kata-kata atau teks yang diperluas, bukan hanya angka. Miles *et al.* (2014) menyatakan bahwa data kualitatif juga dapat muncul sebagai gambar diam atau gambar bergerak yang relevan dengan studi. Sumber data utama dalam studi kualitatif berasal dari observasi, dokumen, dan artefak yang dikumpulkan peneliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*literature review*) secara menyeluruh serta relevan dengan topik penelitian mengenai upaya TCA terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Sumber data sekunder penelitian ini mencakup dokumen tertulis resmi, berita media internasional dari lembaga terkait, dan artikel jurnal ilmiah serta literatur akademik. Jenis dan sumber data yang akan di gunakan mencakup:

- a. Dokumen seperti perjanjian (yaitu *Joint Declaration* yang disepakati tahun 2016). Dokumen tertulis resmi lainnya yang dikeluarkan langsung oleh forum *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA).
- b. Rilis lembaga internasional di bidang keamanan maritim, *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) dalam tautan (<https://www.recaap.org/>), *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dalam tautan (<https://asean.org/>), dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam tautan (<https://www.kemhan.go.id/>) .
- c. Artikel jurnal ilmiah dan literatur akademik yang membahas topik *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Data ini diperoleh melalui *Research Gate*, *Publish or Perish*, Google Scholar, dan web jurnal lainnya yang menyediakan akses pada publikasi ilmiah.
- d. Media Internasional yang membahas topik terkait *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), seperti *ASEAN Regional Forum* (AMF) dalam tautan (<https://asean.org/>), *Trens Reseach and Advisory* dalam tautan (<https://trendsresearch.org/>) , Jstor dalam tautan (<https://www.jstor.org/>) dan *Indo-Pasific Defense Forum* dalam tautan (<https://ipdefenseforum.com/id/>).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai upaya TCA dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, seperti artikel jurnal akademik, dokumen kebijakan, laporan resmi dari ketiga negara, serta publikasi dari organisasi regional seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP). Taylor *et al.* (2016) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik yang bersifat kajian teoritis untuk menelusuri dan mengidentifikasi konsep serta teori yang relevan dengan

fokus penelitian. Melalui studi ini, peneliti dapat memperoleh yang berkaitan dengan kerja sama keamanan maritim dan strategi diplomasi pertahanan trilateral.

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis resmi maupun nonresmi. Dokumentasi tersebut mencakup laporan pelaksanaan kegiatan TCA, deklarasi bersama antara tiga negara sebagai hasil diplomasi pertahanan, serta data insiden kejahatan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Creswell *and* Creswell (2018) menyebutkan bahwa metode dokumentasi mencari data dari catatan, arsip, transkrip, atau dokumen pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan penafsiran makna teks dan dokumen, sehingga memungkinkan peneliti menangkap perspektif dan asumsi yang lebih dalam terkait mekanisme TCA ini. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan identifikasi dan seleksi dokumen resmi serta publikasi yang kredibel dari ketiga negara dan organisasi internasional terkait. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keaslian dokumen untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Selanjutnya, data yang terkumpul diorganisasikan, terutama mengenai upaya TCA agar peneliti dapat membuat kesimpulan mengenai upaya TCA terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur menggunakan kerangka *Multilateral Cooperation Concept* dan *Defence Diplomacy Theory*. Creswell *and* Creswell (2018) menjelaskan bahwa tahapan ini penting untuk menjaga validitas dan keabsahan data serta memudahkan analisis terhadap fenomena yang kompleks.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tahapan utama dalam analisis ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilaksanakan sejak awal pengumpulan data hingga interpretasi akhir (Creswell & Creswell, 2018). Tahap reduksi data meliputi proses memilah, memfokuskan, serta menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus penelitian, yakni kerja sama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian

Timur dalam konteks keamanan maritim. Penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian informasi secara sistematis dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan peneliti menemukan pola dan hubungan antarkonsep. Penarikan kesimpulan mencakup interpretasi mendalam data serta verifikasi temuan untuk menjaga keabsahan hasil penelitian.

Teknik analisis ini digunakan untuk mengkaji data yang ditemukan dari dokumen resmi, laporan operasi patrol, serta literatur lainnya. Teknik ini menekankan pada pemahaman makna teks yang mendasari TCA, sehingga peneliti dapat memahami perspektif dan dinamika yang tidak tampak secara langsung. Dengan demikian, alur analisis data kualitatif ini memungkinkan pemetaan proses kerja sama, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Proses pengorganisasian data dimulai dari identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan diplomasi pertahanan, operasi patroli maritim terkoordinasi, dan pengelolaan ancaman keamanan. Setelah itu, data diklasifikasikan dalam kategori yang relevan agar pola hubungan konsep dapat ditemukan dan dianalisis secara sistematis. Teknik ini sejalan dengan konsep kerja sama multilateral dan diplomasi pertahanan sebagai kerangka teori, sehingga hasil analisis merupakan penjelasan menyeluruh mengenai upaya TCA terkait permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur.

Peneliti mengawali analisis dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi terkait implementasi TCA. Dokumen sekunder tersebut mencakup laporan tahunan ReCAAP, berita media internasional dari lembaga terkait serta publikasi ilmiah dari jurnal akademik. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilah informasi spesifik mengenai isu keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan pilar operasional patroli trilateral secara sistematis. Proses klasifikasi ini memudahkan peneliti dalam menemukan pola hubungan antarkonsep dan teori yang digunakan. Informasi mengenai koordinasi keamanan tiga negara penyusun TCA dikelompokkan ke dalam kategori khusus. Data yang tidak memiliki relevansi dengan wilayah perbatasan Laut

Sulu segera dikesampingkan. Reduksi data memastikan fokus penelitian tetap konsisten pada unit analisis tunggal yang ditetapkan.

Penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian informasi penelitian dalam bentuk narasi sistematis yang runtut. Peneliti menyusun kerangka untuk memetakan perkembangan kondisi keamanan aktual di wilayah perairan tersebut. Grafik insiden digunakan untuk memperjelas konteks masalah. Peneliti kemudian menggunakan koding pola untuk membentuk kategori tematik yang lebih abstrak. Tema besar mengenai efektivitas patroli terkoordinasi dalam menekan kejahatan muncul melalui proses ini. Prosedur koding ini memfasilitasi peneliti dalam menyusun penjelasan logis mengenai implementasi program TCA. Penarikan kesimpulan akhir dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap makna teks yang mendasari data. Peneliti berupaya menemukan penjelasan logis mengenai pola penurunan angka insiden kejahatan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Peneliti mencatat alur sebab-akibat antara intensitas operasional TCA dengan stabilitas keamanan wilayah ini. Kesimpulan substantif harus mampu menjawab rumusan masalah utama mengenai implementasi TCA. Seluruh tahapan proses analisis data ini bertujuan untuk mencapai tingkat pemahaman yang kredibel. Laporan penelitian akhirnya menyajikan hasil temuan dalam bentuk naratif deskriptif.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, keberhasilan implementasi TCA terlihat dari penurunan jumlah insiden kejahatan maritim di Laut Sulu-Sulawesi dan perairan lepas Pantai Sabah bagian Timur. Data ReCAAP mencatat delapan belas insiden nyata terjadi pada tahun 2016. Angka kriminalitas menurun secara bertahap sejak dimulainya operasi patroli terkoordinasi Indomalphi. Laporan resmi menunjukkan tidak ada kasus penculikan sejak tahun 2021. Situasi keamanan di perairan Laut Sulu terus membaik hingga tahun 2025. Tingkat ancaman penculikan diturunkan dari status potensial tinggi menjadi level rendah pada Januari 2025. Kekuatan operasional Kelompok Abu Sayyaf melemah akibat operasi militer yang berkelanjutan. Banyak pangkalan pendukung kelompok militan berhasil dibongkar oleh pasukan keamanan Filipina. Pembebasan sandera dilakukan melalui serangkaian operasi penyelamatan militer yang terukur. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas TCA dalam menanggulangi ancaman asimetris.

Penelitian ini secara komprehensif telah menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) serta mencapai seluruh tujuan penelitian dengan mendeskripsikan secara mendalam terkait evolusi kerja sama tersebut dalam rentang waktu satu dasawarsa, yakni 2016-2025. Implementasi nyata dari berbagai pilar operasional seperti *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), *Trilateral Air Patrol* (TAP), dan penguatan *Maritime Command Center* (MCC) di Tarakan, Tawau, serta Bongao telah terbukti efektif dalam merespons permasalahan keamanan asimetris di *Tri Border Area* (TBA).

Berdasarkan konsep kerja sama multilateral, penelitian ini menyimpulkan bahwa TCA berfungsi sebagai institusi terbatas (*restricted institution*) yang mengikat ketiga negara dalam hubungan yang tidak terpisahkan (*indivisibly linked*) guna menghadapi ancaman Kelompok Abu Syyaf yang memengaruhi stabilitas kawasan secara kolektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerja sama ini memenuhi unsur hubungan yang saling terkait antarnegara, penerapan prinsip perilaku umum, dan adanya timbal balik yang menyebar dalam jangka panjang dalam kerangka kerja yang digunakan. Elemen hubungan tak terpisahkan menjadi elemen paling dominan. Ketiga negara berbagi ancaman yang sama di *Tri Border Area*. Setiap gangguan keamanan di satu wilayah berdampak pada wilayah lain. Kondisi ini membuat koordinasi trilateral menjadi kebutuhan utama. Tanpa kerja sama bersama, ancaman sulit ditangani secara efektif. Operasi patroli juga bergantung pada keterhubungan antarnegara melalui MCC. Karena itu, elemen ini menjadi dasar terbentuknya TCA. Hubungan antarkepentingan keamanan ketiga negara bersifat sangat erat.

Analisis teori diplomasi pertahanan mempertegas bahwa TCA bukan sekadar koordinasi militer biasa, melainkan sebuah proses diplomasi pertahanan transformasional yang berhasil menyelaraskan pemikiran strategis para pembuat kebijakan dan membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*) yang baik. Fungsi transformasional lebih dominan daripada fungsi pragmatis karena TCA lahir dari situasi krisis yang membutuhkan perubahan mendasar. Tanpa fungsi transformasional, TCA tidak akan pernah terbentuk sebagai respons terhadap krisis tahun 2016. Fungsi pragmatis baru dapat beroperasi setelah fungsi transformasional berhasil membangun fondasi kepercayaan dan kerangka kerja sama. Fungsi transformasional menghasilkan perubahan struktural yang bersifat permanen dalam kerangka keamanan kawasan TBA.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah, perlu mempertahankan keberlanjutan mekanisme patroli maritim pada masa mendatang. Peningkatan teknologi pengawasan radar pantai harus terus dilakukan secara berkala. Ketiga negara sebaiknya memperluas cakupan kerja

sama intelijen terhadap kejahatan siber. Penguatan kerangka hukum mengenai prosedur pengejaran lintas batas perlu segera dirumuskan. Kapasitas personel militer harus terus ditingkatkan melalui latihan gabungan yang variatif. Integrasi sistem informasi maritim antar negara perlu dioptimalkan agar lebih responsif. Peran *Liaison Officer* sebaiknya diperkuat melalui penambahan wewenang pengambilan keputusan. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti ReCAAP perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap efektivitas koridor transit sebaiknya dilakukan setiap satu tahun sekali. Stabilitas keamanan maritim harus dijaga demi kepentingan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada peran pemerintah provinsi perbatasan, yaitu Kalimantan Utara (Indonesia), Sabah (Malaysia), dan Tawi-Tawi (Filipina), dalam mendukung implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tingkat subnasional. Ketiga wilayah tersebut tidak hanya menjadi lokasi strategis operasional TCA, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan logistik yang menunjang pelaksanaan patroli trilateral. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah melihat kebijakan keamanan yang disepakati di tingkat nasional ke dalam tindakan operasional di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Selain itu, penelitian mengenai keterkaitan TCA dengan paradiplomasi provinsi juga menjadi relevan karena TCA berpotensi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan hubungan fungsional lintas batas dengan mitra subnasional di negara tetangga. Melalui kerja sama dalam bidang pertukaran informasi keamanan, pengelolaan lalu lintas maritim, dan respons darurat, pemerintah provinsi dapat berperan sebagai aktor pendukung diplomasi keamanan yang melengkapi kebijakan pemerintah pusat.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis terkait tantangan hukum internasional terkait mekanisme *hot pursuit* sangat diperlukan. Kejelasan status hukum mekanisme *hot pursuit* akan mengurangi risiko gesekan diplomatik dari ketiga negara. Kajian mengenai dinamika politik domestik yang memengaruhi komitmen negara juga

menarik dilakukan. Peneliti juga dapat mendalami efektivitas TCA dalam menangani isu keamanan lainnya seperti, penyelundupan narkoba, senjata dan manusia di wilayah TBA. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh TCA secara tidak langsung dapat mencegah adanya isu keamanan lainnya di wilayah ini. Selain itu, penelitian terkait lamanya operasi penyelamatan dan pembebasan awak kapal yang di sandera oleh kelompok kriminalitas di wilayah ini yang memakan waktu lebih dari satu tahun menarik untuk dikaji guna mengetahui penyebab hal ini bisa terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albek, C. A. (2021). *Understanding and Combating Piracy in the Sulu Sea*. (21).
- Aliyah, Y., Mahroza, J., Alam, T. M., Sutanto, R., Patmi, S., & Prakoso, L. Y. (2024). Strategy for Securing Indonesia's Border Sea Area in the Sulu Sea Through Trilateral Maritime Patrol Indomalphi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(2), 310–328. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i2.8030>
- Andalus, M. K., Muradi, & Djuyandi, Y. (2023). Enhancing Counterterrorism Cooperation Through Intelligence Collaborations in Indomalphi (2018-2023). *JURNAL KEAMANAN NASIONAL*, 9(2), 325–350.
- Ansiga, D. (2026). *Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kerja Sama Trilateral Indomalphi Sebagai Upaya Mitigasi Ancaman Asimetris Di Perbatasan Laut Sulu-Sulawesi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardiansyah, R. (2019). *Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)*. Universitas Komputer Indonesia.
- A.S. memperkuat ikatan dan menegakkan keamanan maritim di Pasifik. (2025). *Indo-Pacific Defense FORUM*. <https://ipdefenseforum.com/id/2025/08/a-s-memperkuat-ikatan-dan-menegakkan-keamanan-maritim-di-pasifik/>

- Atamimi, R. A., & Azzqy, A. A. R. (2020). Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Indomalphi) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019. *Balcony*, 39–50.
- Chaer, M. I., Sumarlan, S., & Widodo, P. (2021). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerja Sama Trilateral Cooperative Arrangement (Port Visit Indomalphi 2017-2019). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(3). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i3.787>
- Chatmas. (2021). *Indo-Pacific Forces from 21 Partner Nations Kick Off SEACAT. U.S. Indo-Pacific Command*. <https://www.pacom.mil/Media/NEWS/News-Article-View/Article/2726439/indo-pacific-forces-from-21-partner-nations-kick-off-seacat/>
- Costa, G. D. (2023). Indonesia, Malaysia, Philippines renew commitment to cooperation. *Indo-Pacific Defense FORUM*. <https://ipdefenseforum.com/2023/07/indonesia-malaysia-philippines-renew-commitment-to-cooperation/>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention. *The Adelphi Papers*, 44(365), 15–30. <https://doi.org/10.1080/714027947>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition)*. SAGE Publications.
- Daniel, C. G., Daniel, C. G., & Marzaman, A. P. (2024). Enhancing Indonesian Maritime Route Security to Prevent Transnational Crime. *Buletin Poltanesa*, 24(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v24i2.2943>
- Dirgantara, O. B., Eko W, T., & Suharto, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di

- Wilayah Laut Sulu. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8, 14–23.
- Drab, L. (2018). Defence diplomacy – an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state. *Security and Defence Quarterly*, 20(3), 57–71. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5152>
- Edwards, Dr. S. (2021). Upaya Maritim Keamanan Tumbuh di Filipina. *Indo-Pacific Defense FORUM*. <https://ipdefenseforum.com/id/2021/09/upaya-maritim-keamanan-tumbuh-di-filipina/>
- Espeña, J. B. (2020). INDOMALPHI: A Future for Southeast Asian Security? | *Atlas Institute for International Affairs*. <https://atlasinstitute.org/indomalphi-a-future-for-southeast-asian-security/>
- Espenilla, J. J. F. (2017). Expanding the Right of Hot Pursuit: Challenges for Cooperative Maritime Law Enforcement Between the Philippines and Indonesia. *KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.54007/ijmaf.2017.9.1.1>
- Febrianto, N. (2024). *Deploy KRI Kakap-811, RI-Philippine Joint Patrol At Border 5'14 September*. <https://voi.id/en/news/416322>
- Febrica, S. (2014). *Explaining Indonesia's Participation in Maritime Security Cooperation*. University of Glasglow.
- Frappi, C., & Valigi, M. (2025). *Patterns For Cooperation In The Southern Caucasus Area*.
- Fulton, J. (2017). Meningkatkan kerja sama keamanan maritim di Selatan Asia dan Asia Tenggara. *Indo-Pacific Defense FORUM*. <https://ipdefenseforum.com/id/2017/09/meningkatkan-kerja-sama-keamanan-maritim-di-selatan-asia-dan-asia-tenggara/>

- Hermawan, O. N. (2016, July 15). *Indonesia, Malaysia dan Filipina Setuju Untuk Mengoprasionalkan Kerjasama Trilateral Untuk Meningkatkan Keamanan Maritime*. <https://tniad.mil.id/indonesia-malaysia-dan-pilipina-setuju-untuk-mengoprasionalkan-kerjasama-trilateral-untuk-meningkatkan-keamanan-maritime/>
- Hutagalung, S. M., Hutabarat, L., & Simatupang, R. H. (2019). *Tantangan Kerjasama Keamanan Di Perairan Asean Oleh Indonesia Pandangan Hukum Dan Hukum Internasional*.
- Hutomo, B. W., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 143–153.
- Indonesia, Malaysia dan Filipina Resmi Mulai Kerja Sama Patroli Maritim Terkoordinasi*. (2017). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>
- Jajanidze, B. (2022). Regional Security Trends In The South Caucasus: Azerbaijan-georgia-turkey Trilateral Strategic Cooperation. *საგარეო ურთიერთობების მეცნიერება*, 1, 32–36. <https://doi.org/10.61446/ds.1.2022.6456>
- Jelang Corpat Philindo XXXVIII Dan Port Visit Tmp Indomalphi 2024, Tni Al Sambut Kedatangan Kapal Perang Filipina*. (2024). Retrieved April 30, 2026, from <https://www.tnial.mil.id/berita//Jelang-Corpat-Philindo-XXXVIII-Dan-Port-Visit-Tmp-Indomalphi-2024,-Tni-Al-Sambut-Kedatangan-Kapal-Perang-Filipina/>
- Joanita, U. (2019). *Implementasi Trilateral Cooperative Arrangement (Tca) Indomalphi Sebagai Hasil Dari Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam*

Menanggulangi Ancaman Keamanan Di Laut Sulu Periode 2016 – Oktober 2018. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Joanita, U., Swastanto, Y., & Sudiby, S. (2025). Scenario Forecasting on the Sustainability of TCA Indomalphi in Suppressing Armed Robbery at Sea (2025–2045). *Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(4), 957–966. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i4.787>

Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philippines, Malaysia and Indonesia. (2016).

Kahler, M. (1992). Multilateralism with small and large numbers. *International Organization*, 46(3), 681–708. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027867>

Keliat, M., Sugianto, D. N., Yonvitner, Damanik, R., Noor, R., Lestari, I., Marzuki, F. R., Putra, R. D., Aryanti, D., Handayani, E. P., Lesdantina, D., Adrianto, L., Muawanah, U., & Farizal, F. (2022). *Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia*. LAB 45 Monograf.

Kemhan RI Jadi Tuan Rumah “24th INDOMALPHI Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Arrangement”. (2024). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2024/05/16/kemhan-ri-jadi-tuan-rumah-24th-indomalphi-joint-working-group-meeting-on-the-trilateral-cooperative-arrangement.html>

Kemhan Serahkan Fasilitas Radar Coastal Surveillance kepada TNI AL, Tingkatkan Pengawasan Laut NKRI. (2025). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2025/08/13/kemhan-serahkan-fasilitas-radar-coastal-surveillance-kepada-tni-al-tingkatkan-pengawasan-laut-nkri.html>

Keohane, R. O. (1990). Multilateralism: An Agenda for Research. *International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis*, 45(4), 731–764.

<https://doi.org/Keohane>, <https://doi.org/10.1177/002070209004500401>
(Original work published 1990)

Khasanah, U., Utama, T. C., & Alfian, M. F. (2021). Analisis Peran Indonesia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral di Laut Sulawesi – Sulu Pada Tahun 2016 – 2018. *Journal of International Relations*, 7(4), 179–191.

Krestiwawan, W., Komaruddin, K., & Wiwit, H. (2025). Pengaruh Kerjasama Internasional dan Kesiapan Alutsista Terhadap Stabilitas Keamanan Maritim di Wilayah Laut Perbatasan Kalimantan Utara. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(5), 1407–1415.
<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.848>

Kumendong, R. (2026). Why Trilateral Cooperation Failed to Curb ISIS: A Regional Security Complex Theory Analysis. *Journal of Political Issues*, 7(2), 107.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i2.377>

Latusia, C. E. J. (2021). Tindakan Perompakan Di Laut Dalam Perspektif ASEAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.

Lazarou, E., Edwards, G., Hill, C., & Smith, J. (2010). *The Evolving 'Doctrine' of Multilateralism in the 21st Century*. 3.

Loing, M. A., Oktavian, R., & Damayanti, A. (2025). Rezim Keamanan Maritim Indonesia-Filipina Dalam Pemberantasan Penyelundupan Di Perbatasan Laut Sulawesi. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(2), 273–304.
<https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.612>

Manullang, G. H., & Rachman, M. F. A. (2023). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA). *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 14–24. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.367>

Maramis, R. R., Swastanto, Y., & Anwar, S. (2024). Diplomasi Pertahanan sebagai Upaya Mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari Kejahatan Transnasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6422–6432.

Maulana, A. J., & Wijaya, T. A. (2022). Kerja Sama Multilateral Indonesia sebagai Strategi Perlawanan Terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(2), 36–42.
<https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i2.57>

Menhan Prabowo Bertemu Menhan Malaysia dan Filipina, Bicarakan Kerja Sama Keamanan Maritim. (2022). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
<https://www.kemhan.go.id/2022/03/28/menhan-prabowo-bertemu-menhan-malaysia-dan-filipina-bicarakan-kerja-sama-keamanan-maritim.html>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Edition 3)*. Sage.

Morris, L., & Persi Paoli, G. (2018). A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities. *RAND Corporation*.
<https://doi.org/10.7249/RR2469>

Muniruzzaman, A. N. M. (2020). Defence Diplomacy: A Powerful Tool of Statecraft. *Claws Journal*, 13(2), 63–80.

Nye, J. S. (2009). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. Public Affairs.

Ohn, D., & Richey, M. (2014). Cooperation on Counter-Piracy in the Gulf of Aden among China, Korea, and Japan: Implications for Trilateral Security Cooperation in Northeast Asia. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 26(1), 81–95.

Pertemuan 21th INDOMALPHI JWG on TCA, Kemhan Harapkan Peningkatan Upaya Kolaboratif Malaysia dan Filipina pada Perdamaian dan Keamanan

- KawasanKementerian Pertahanan Republik Indonesia*. (2023). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2023/06/14/pertemuan-21th-indomalphi-jwg-on-tca-kemhan-harapkan-peningkatan-upaya-kolaboratif-malaysia-dan-filipina-pada-perdamaian-dan-keamanan-kawasan.html>
- Philip, B. (2025). *Air and Space Power: Maritime Security*.
- Pradityo, R. (2024). Maritime Insecurities in the Sulu and Sulawesi Seas. *Jurnal Sosial Humaniora*, 17(1), 17. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v17i1.18051>
- Pramudwinai, D. (2019). *Annual Security Outlook 2019*. Asean Regional Forum.
- Primayanti, L. P. I., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2020). Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.825>
- Putra A., I. N. (2016). *Analisis Ancaman Maritim sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Mendukung Penyelenggaraan Strategi Pertahanan Negara di Laut*. CV. Bintang Surabaya. <http://repository.sttal.ac.id/id/eprint/15>
- Putra, A. P. (2022, March 29). *Indonesia-Filipina-Malaysia Perkuat Kerja Sama Keamanan Maritim. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-filipina-malaysia-perkuat-kerja-sama-keamanan-maritim>
- Rafiqi, F. (2025). *Migrasi sebagai isu keamanan regional: Analisis kerja sama trilateral di perbatasan laut Sulu–Sulawesi*. 1(1).
- Rakhmagina, N., & Shiddiqy, M. A. A. (2025). *Strategi Bakamla Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Di Selat Malaka*. 11(2).

- Rantung, G. (2021). Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Dan Filipina Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Maritim Di Perairan Sulu. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(4).
- ReCAAP, I. (2016). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2016*.
- ReCAAP, I. (2017). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2017*.
- ReCAAP, I. (2018). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2018*.
- ReCAAP, I. (2019). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2019*.
- ReCAAP, I. (2019). *Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah*. [Online post].
- ReCAAP, I. (2020). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2020*.
- ReCAAP, I. (2021). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2021*.
- ReCAAP, I. (2022). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2022*.
- ReCAAP, I. (2023). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2023*.
- ReCAAP, I. (2024). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2024*.

- ReCAAP, I. (2025). *Annual Report Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2025*.
- Ridho, M., & Sudirman, A. (2020). Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 165–182. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i2.2174>
- Rijal, N. K. (2019). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22350>
- Rohmanullah, N. M., & Michael, T. (2025). Pertanggungjawaban Negara Dalam Pencegahan Perompakan Di Perairan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6).
- Rosadi, N. A. (2019). *Strategi Pertahanan Kelompok Maritime Guerilla War Abu Sayyaf (2012-2017) Di Tengah Intensitas Kerjasama Counter-Piracy*. Universitas Airlangga.
- Roza, R. (2018). Keamanan Laut Sulu-Sulawesi: Kaji Ulang Kerja Sama Trilateral? *Info Singkat, Bidang Hubungan Internasional*, 10(20).
- Ruggie, J. G. (1992). *Multilateralism: The anatomy of an institution*. *International Organization*, 46(3), 561–598.
- Rustam, I. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu. *Journal of Political Research*, 14(2), 161–177.
- Rustam, I., Bustami, S. Y., & Sabilla, K. R. (2022). The Effectiveness of Indomalphi Trilateral Cooperation in Reducing Maritime Piracy by Abu Sayyaf Group in the Sulu-Sulawesi Sea. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(2), 163–183. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i2.2247>

- Sandoval, M. (2025). *SEACAT 2025 concludes, reinforcing maritime security efforts among allies, partners in Sou. U.S. Pacific Fleet*. <https://www.cpf.navy.mil/Newsroom/News/Article/4312090/seacat-2025-concludes-reinforcing-maritime-security-efforts-among-allies-partne/>
- Saraswati, A. L., & Pinatih, N. K. D. A. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016. *Transformasi Global*, 7(1), 114–143. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.6>
- Ship Reporting System for East Coast of Sabah, Sulu Archipelago and West Coast of Mindanao—Transit Corridors*. (2018). [Security Related Information To Mariners Q6112/2018/001]. United Kingdom Hydrographic Office.
- Storey, I. (2018). *Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress*. Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, 48(2018).
- Suaimi RMN, L. M. S. bin M. (2023). Maritime Security In Southeast Asia: The Role Of Information Sharing Operation Centres. *Republic of Indonesian Navy – Royal Australian Navy Joint Publication*.
- Takagi, Y. (n.d.). *In Search of Maritime Governance Cooperation: A Case Study of the Sulu Celebes Seas*.
- Tan, S. S., & Singh, B. (2012). Asian Security. *Routledge*, 8(3), 221–231. <https://doi.org/10.1080/14799855.2012.723916>
- Taylor, B., Blaxland, J., White, H., Bisley, N., Leahy, P., & Tan, S. S. (2014). *Defence Diplomacy: Is the Game Worth the Candle? ANU Strategic and Defence Studies Centre*.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & De Vault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods* (4 th Edition).

- Tumilaar, J. M., Rachmat, A. N., & Benarrivo, R. (2025). Kerjasama Indonesia, Malaysia Dan Filipina Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Di Laut Sulu Tahun 2016 – 2018. *Global Insight Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2727>
- Wee, V. (2017). *Indonesia, Malaysia and the Philippines launch joint patrols in Sulu*. <https://www.seatrade-maritime.com/regulations/indonesia-malaysia-and-the-philippines-launch-joint-patrols-in-sulu-sea-amid-terror-threat>
- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy. What Do Ideas Do?*, 33.
- Wirawan, D., Pramono, B., & Prasetyo, T. B. (2022). Defense Diplomacy Strategy in Handling Transnational Crimes at the Sea Borders of Indonesia – Malaysia – Filipina. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(2), 376–383. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i2-01>
- Wiswayana, W. M. (2023). Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia- Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Kawasan Maritim. *JURNAL KEAMANAN NASIONAL*, 9(1), 181–202.
- Xanditama, B. R. (2021). *Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia-Filipina Dalam Maritime Patrol Indomalphi (Tmpi) Guna Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Laut Sulu, 2016-2020*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Yani, F., Rahmi, E., Haslam, Y., Purba, B. W., Irfan, M., Kuswanto, A., Kurniawan, A., Hudri, Z., & Hidayatullah, B. (2023). Kajian Terhadap Penyelesaian Kejahatan Perompakan Di Laut Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3122–3135.
- Yaoren, K. Y., Dass, R. A. S., & Singh, J. (2021). *Martime Malice in Malaysia, Indonesia and the Philippines: The Asymmetric Maritime Threat at the Tri-*

Border Area [Policy Brief]. International Center For Counter Terrorism - The Hague.

Yeo, K. (2024). *Maritime Counterterrorism: The Trilateral Cooperative Arrangement*. <https://trendsresearch.org/insight/maritime-counterterrorism-the-trilateral-cooperative-arrangement/>

Yildirim, E. (2025). Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında regional əməkdaşlıq. *Global Spectrum of Research and Humanities*, 2(4). <https://doi.org/10.69760/gsrh.0250203018>

Yudha, I., & Wiswayana, W. M. (2025). *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Di Kawasan Selat Malaka Melalui Kerjasama Littoral States (Indonesia-Malaysia-Singapura) Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode I (2014-2019)*. 4.

Yusuf, Muh. F. (2024). *Implementasi Poros Maritim Dunia Di Asean Dalam Sektor Perekonomian Indonesia*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Zulkipli, M. S. (2018). Cooperation On Mda Through Indomalphi Trilateral Cooperative Arrangement (Tca). *Arf Workshop On International Cooperation On Mda*, Tokyo.